



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2026**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

KETIGA : Unit pemrakarsa program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2026 melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan evaluasi atas perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial.

KELIMA : Pengajuan Peraturan Menteri Sosial di luar program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2026 dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Sosial.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI SOSIAL TAHUN 2026

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2026

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Unit Pemrakarsa
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum Sekolah Rakyat	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Indeks Kesejahteraan Sosial	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial	
9.	Peraturan Menteri Sosial tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Unit Pemrakarsa
11.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat	Biro Umum
12.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kebijakan Akuntansi Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Keuangan
13.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial	
14.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Hubungan Masyarakat
15.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
16.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Sembako	
17.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Sosial berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana	
18.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	
19.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
20.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	
21.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan	
22.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Taman Anak Sejahtera	
23.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	
24.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
25.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
26.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial	
27.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal
28.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Sosial	

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Unit Pemrakarsa
29.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
30.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	
31.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peserta Didik Sekolah Rakyat	
32.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	
33.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial	
34.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	
35.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003